

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA CILEGON**

SKRIPSI



Dosen Pembimbing:

Suharto S.E., M.Si.

Oleh:

Nama : Anatoly Aditya Saputra

Nomor Mahasiswa : 14313134

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA**

2018

**Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan
Pajak Daerah di Kota Cilegon**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar
Sarjana jenjang strata 1 Program Studi Ilmu Ekonomi,
pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Anatoly Aditya Saputra

Nomor Mahasiswa : 14313134

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh –sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Eekonomi Universitas Islam Indonesia (FE UII). Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Maret 2018

Penulis,



Anatoly Aditya Saputra

PENGESAHAN

Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah
di Kota Cilegon

Nama : Anatoly Aditya Saputra

Nomor Mahasiswa : 14313134

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 12 Maret 2018

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Suharto S.E., M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DI KOTA CILEGON**

Disusun Oleh : **ANATOLY ADITYA SAPUTRA**

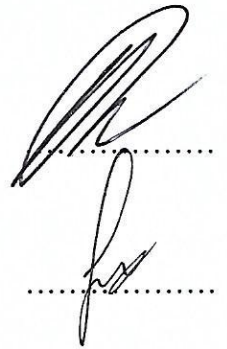
Nomor Mahasiswa : **14313134**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Jum'at, tanggal: 13 April 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Suharto, SE., M.Si.

Penguji : Rindang Nuri Isnaini N., SE., M.E.K.



.....
.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Harjito, M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas rahmay dan hidayah serta kemudahan yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.

Skripsi ini dipersembahkan penulis untuk:

- Kepada kedua Orang tua penulis Bapak Fathoni dan Ibu Ninik Minarsih yang selalu menjadi motivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini serta memberikan dukungan berupa dukungan moril dan materi serta doa tiada henti.
- Kepada Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Suharto, S.E., M.Si. yang telah bersedia membimbing, membantu dan mengajarkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Ika Indrawati, S. Ked. yang telah menjadi penyemangat dalam penyusunan skripsi ini.
- Keluarga UII Career Center, Bapak Baziedy Aditya Darmawan, S.E., M.M., Mas Sulman, Mas Andy Hakim, dan Mbak Citra yang telah membantu, menghibur, dan mendo'akan serta memberikan nasehat dan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
- Teman – teman Marketing and Communication khususnya teman – teman seperjuangan angkatan 2014, Arief Rizaldi, Aditya Anwar, Qodri, Okza, M. Arief Fadhillah, Nur Diana, dll. Terimakasih telah memberikan doa, semangat, nasehat, dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Judul yang diajukan adalah Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Cilegon.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini :

1. Allah SWT yang selalu memberikan petunjuk, pncearahan, kemudahan serta ridho, dan kasih sayang kepada hamba-Nya, dan tidak terkecuali penulis.
2. Orang tua penulis (Bapak dan Mama) yang telah memberikan dukungan secara moril dan selalu memberikan dukungan dan doa terbesar untuk kesuksesan penulis.
3. Bapak Suharto, S.E, M.Si. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan meluangkan waktu selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Aksyim Affandi, M.A., Ph.D selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Drs. Dwiprptono Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dan memberikan izin untuk melakukan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu

selama mengikuti perkuliahan sampai dengan penyusunan proposal penelitian ini.

7. Bapak Insan Wahyu yang bertugas pada BPS Kota Cilegon yang telah membantu dalam pencarian data.
8. Bapak Adriano dan Ibu Yeyen yang bertugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon yang telah membantu dalam pencarian data.
9. Ika Indrawati, S. Ked. yang telah sabar dan selalu memberi dukungan selama ini.
10. Bapak Baziedy Aditya Darmawan, S.E., M.M. selaku Kepala Divisi UII Career Center yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan selama penulisan skripsi ini.
11. Keluarga UII Career Center yaitu Mas Sulman Affandi, Mas Andy Hakim, Mbak Citra Ananda yang telah membantu dan memberikan dukungan motivasi dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman – teman penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah penulis.

Semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 12 Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN	iii
PENGESAHAN UJIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Manfaat Penelitian	12
BAB II	14
LANDASAN TEORI	14
2.1 Kajian Pustaka	14
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15
2.2.2 Pajak Daerah	20
2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto	23
2.2.4 Inflasi	24
2.2.5 Jumlah Penduduk	26
2.2.6 Jumlah Industri	27
2.2.7 Hubungan Variabel Dependen dengan Variabel Independen	28
2.2.7.1 Pengaruh PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah	28

2.2.7.2	Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah	28
2.2.7.3	Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah.....	28
2.2.7.4	Pengaruh Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah	29
2.3	Kerangka Pemikiran	29
2.4	Hipotesis Penelitian.....	30
BAB III.....		31
METODOLOGI PENELITIAN		31
3.1	Metode Analisis Data	31
3.1.1	Obyek Penelitian	31
3.1.2	Subyek Penelitian	32
3.1.3	Teknik Pengumpulan Data	32
3.2	Model Regresi	33
3.3	Metode Analisis.....	34
3.3.1	Analisis deskriptif.....	34
3.3.2	Uji Normalitas	34
3.3.3	Uji T (Parsial).....	34
3.3.4	Uji F (Simultan).....	35
3.3.5	Analisis Determinasi (R^2).....	35
BAB IV		36
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		36
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	36
4.2	Analisis Deskriptif.....	37
4.3	Analisis Data dan Pembahasan.....	38
4.3.1	Hasil Uji MWD	39
4.3.2	Uji Statistik :	41
4.3.2.1	Uji T	41
4.3.2.2	Uji F.....	43
4.3.2.3	Analisis Determinasi (R^2).....	43
4.3.3	Uji Asumsi Klasik	44
4.3.3.1	Uji Multikolinearitas	44

4.3.3.2	Uji Heteroskedastisitas Breusch-Pagan-Godfrey	45
4.3.3.3	Uji Heteroskedastisitas Glejser.....	46
4.3.3.4	Uji Autokorelasi	46
4.4	Interpretasi Hasil Pengolahan Data	47
4.4.1	Pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah	47
4.4.2	Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah	48
4.4.3	Pengaruh Inflasi terhadap Pajak Daerah.....	48
4.4.4	Pengaruh Jumlah Industri terhadap Pajak Daerah.....	50
BAB V	52
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	52
5.1	Kesimpulan.....	52
5.2	Implikasi.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN – LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Kota Cilegon Tahun 2006 - 2016.....	6
Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 - 2016 (Dalam Rupiah)	7
Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan PDRB, PDRB Perkapita dan Inflasi Kota Cilegon Tahun 2006 - 2016.....	9
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kota Cilegon Tahun 2006 - 2016.....	10
Tabel 4.1 Penerimaan Pajak Daerah, PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Jumlah Perusahaan di Kota Cilegon Tahun 2001 - 2016	37
Tabel 4.2 Hasil Uji MWD Linier.....	39
Tabel 4.3 Hasil Uji MWD Log Linier	39
Tabel 4.4 Hasil Uji Log Linier.....	40
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	44
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	45
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Breusch-Pagan-Godfrey	45
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser	46
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi	46

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Cilegon tahun 2001 – 2016 dengan menggunakan variabel Produk Domestik Bruto (PDRB), jumlah penduduk, inflasi, dan jumlah industri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari PDRB, jumlah penduduk, inflasi, dan jumlah industry terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Cilegon tahun 2001 – 2016.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*time series*) tahun 2001 – 2016 yang bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Cilegon dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon. Pada penelitian ini menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Proses pengujian yang digunakan terdiri dari pengujian secara statistic meliputi uji T, uji F, dan uji determinasi (R^2) pengujian ekonometrika (asumsi klasik) meliputi Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

Hasil analisis data dengan regresi log linier berganda diperoleh bahwa PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan inflasi dan jumlah industri tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cilegon. Hasil Uji ekonometrika tidak menunjukkan adanya gangguan multikolinearitas, gangguan heteroskedastisitas, dan gangguan autokorelasi.

Kata Kunci : Pajak Daerah, PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Industri.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara di Asia Tenggara yang terdiri dari 34 provinsi yang terbagi menjadi 416 kabupaten dan 98 kota. Setiap daerah memiliki regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya kepada masyarakat. Pemerintah dan masyarakat berpartisipasi untuk memaksimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut guna merancang, membangun, dan mengoptimalkan pembangunan daerah.

Pembangunan di Indonesia telah melalui berbagai macam masa yang dimulai dengan adanya orde lama, orde baru dan masa reformasi pada dewasa ini yang membawa Indonesia pada perubahan – perubahan pembangunan yang diharapkan dapat tercapainya kesejahteraan masyarakatnya secara adil dan merata. Tentunya dengan luas Indonesia yang memiliki pulau sebanyak 17.508 yang tersebar sehingga menjadi tantangan bagi rakyatnya untuk menciptakan kesejahteraan itu sendiri.

Pada masa Orde Baru Indonesia menerapkan sistem pemerintahan sentralistik dimana sistem pemerintahan yang dilakukan bersumber dari pusat sedangkan pemerintah daerah hanya tinggal menjalankan sepenuhnya yang sudah ditetapkan oleh pusat. Namun hal ini membuat daerah umumnya memiliki berbagai potensi sumber kekayaan yang

berbeda-beda yang memiliki berbagai macam faktor yaitu dari faktor iklim, geografis, dan kekuatan ekonomi menjadi tidak terealisasi dengan semestinya sehingga menyebabkan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Dengan demikian, Indonesia guna mendukung pelaksanaan pembangunan pemerintah melaksanakan reformasi dengan menetapkan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI serta mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah.

Melalui kebijakan diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dimana dalam proses pengambilan atau pemungutan tersebut diluar pemisahan turut campur dari pemerintah pusat karena saat ini sistem pengelolaannya menganut sistem desentralisasi yaitu segala pengelolaan dan pemberian kebijakannya diatur dalam peraturan daerah dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan keuangan daerah, memberdayakan segala potensi perekonomian daerah

yang ada untuk dijadikan sebagai pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan tersebut adalah pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah ditetapkan oleh daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah tersebut. Pendapatan daerah tersebut kemudian akan digunakan untuk melakukan berbagai macam pembiayaan dalam pembangunan nasional dan daerah pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu melihat dan mengolah sumber-sumber pendapatan daerah agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2007 pajak merupakan salah satu sektor terbesar yang menambah penghasilan sumber pendapatan negara maupun daerah pada saat ini. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹.

Ditinjau dari segi lembaga pemungutan dan pengelolanya pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak pusat (pemerintah) dan pajak daerah. UU No. 32 tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri²:

(1) Hasil pajak daerah,

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

² Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 157

- (2) Hasil retribusi daerah,
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- (4) Lain-lain PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang didapat dari sumber-sumber daya dan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri. Semakin besar penenanan PAD dalam pendapatan daerah maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat yang menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam melakukan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Selain pajak daerah, retribusi daerah merupakan komponen penting lain dalam PAD.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak dan retribusi daerah memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah, kemudian dialokasikan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, pajak daerah terbagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah Provinsi atau Kabupaten yang bersangkutan (Haniz, 2013).

Undang-Undang No. 18 yang ditetapkan pada tahun 1997, menyatakan bahwa pajak daerah memiliki peranan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan otonomi daerah yang serasi, dinamis, nyata, dan bertanggung jawab dengan menitikberatkan pada Daerah Tingkat II.

Kota Cilegon yang berdiri pada tanggal 27 April 1999 merupakan salah satu kota di Propinsi Banten yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatannya sendiri. Dikenal dengan Kota Industri. Kota Cilegon dengan jumlah penduduknya yang tinggi membuat Kota Cilegon menjadi kota terbesar ke-4 di Provinsi Banten sebagai kota penyumbang PAD besar bagi provinsi Banten. Potensi perekonomian Kota Cilegon berasal dari Perdagangan, Perhotelan dan Restoran, dan Industri. Hotel dan restoran menyerap tenaga kerja sebanyak 33.116 tenaga kerja, sedangkan industri menyerap sebanyak 29.755 tenaga kerja. Beberapa industri yang ada di Cilegon diantaranya Industri Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya Listrik, Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant, dan Kawasan Industri Berikat Selat Sunda. Selain dikenal sebagai kota industri, Cilegon juga dikenal sebagai kota baja. Cilegon merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara, dan sekitar 6 juta ton baja dihasilkan setiap tahunnya di kawasan industri Krakatau Steel. Krakatau Steel saat ini melakukan *joint venture* dengan perusahaan asal Korea Selatan dan seiring dengan bertambahnya investasi asing melalui penanaman modal langsung di Cilegon, telah terjadi peningkatan perekonomian yang berarti dengan meningkatnya indikator PDRB di Kota Cilegon. Selain baja dan

perindustrian yang dimiliki oleh Kota Cilegon, sektor lain yang dimiliki oleh Kota Cilegon adalah sektor pelabuhan seperti Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Cigading Habeam *Center*.

Tabel 1.1
Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang
di Kota Cilegon Tahun 2006 - 2016

Tahun	Jumlah Industri
2006	51
2007	72
2008	69
2009	72
2010	76
2011	77
2012	77
2013	77
2014	81
2015	80
2016	79

Sumber : BPS Provinsi Banten

Berdasarkan data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon, diperoleh data bahwa pajak daerah terhadap PAD di Kota Cilegon. Berikut data kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Cilegon dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 1.2

**Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon
Tahun 2006 - 2016 (Dalam Rupiah)**

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Besar Kontribusi (%)
2006	112.242.273.817	77.001.182.988	68,60
2007	92.802.293.870	73.410.440.255	79,10
2008	129.831.026.861	79.545.273.663	61,27
2009	135.537.939.538	82.328.146.411	60,74
2010	150.249.201.605	84.928.180.856	56,52
2011	253.212.004.831	172.965.160.026	68,31
2012	331.861.814.250	147.686.642.561	44,50
2013	291.943.585.049	177.144.972.228	60,68
2014	467.945.449.677	340.323.435.803	72,73
2015	579.585.574.661	412.600.922.492	71,19
2016	567.453.107.619	392.549.543.855	69,18

Sumber : DPPKD Kota Cilegon

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa kontribusi pajak daerah Kota Cilegon dari tahun 2006 sampai dengan 2016 terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya. Pajak Daerah merupakan komponen terbesar dari PAD hal ini dapat dilihat dari besar kontribusi dan pengaruh pajak daerah terhadap PAD. PAD tertinggi pada sepanjang tahun 2006 sampai dengan 2016 yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp. 467.945.449.677 yang kemudian diikuti dengan pajak daerah yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 340.323.435.803 yang merupakan pajak daerah tertinggi sepanjang tahun 2006 sampai dengan 2016 dengan besar kontribusi sebesar 72,73% namun mengalami penurunan dua tahun kedepan.

Inflasi yang terjadi di suatu negara dapat mempengaruhi jumlah penerimaan di sektor pajak. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan *output* yang cepat adalah dengan melakukan pembangunan untuk mengatasi pengangguran besar-besaran dan penggunaan modal yang sangat rendah. Namun hal tersebut ternyata tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Dalam keadaan demikian, dapat dijumpai kenaikan harga yang diperkirakan merupakan kebijakan fiskal yang cermat untuk menghindari inflasi. Maka dapat disimpulkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negative terhadap penerimaan pajak. Pada kondisi seperti ini, pemerintah cenderung memutuskan untuk menyerap kenaikan *output* tanpa menaikkan pajak, yang dapat menyebabkan permintaan agregat meningkat (inflasi akibat permintaan) (Wantara, 1997).

Kenaikan biaya secara tiba-tiba akan mendorong kenaikan harga apabila didukung oleh perluasan pemerintah. Apabila tidak diambil kebijakan segera untuk mengatasi hal tersebut, maka akan timbul kebutuhan akan kenaikan upah untuk mengimbangi biaya (inflasi akibat penawaran).

Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pajak. Dengan meningkatnya pendapatan pemerintah melalui pajak, pertumbuhan ekonomi akan semakin baik. Hal ini disebabkan karena *support* finansial pembangunan bersumber dari rakyat itu sendiri.

Tabel 1.3
Realisasi Penerimaan PDRB, PDRB Perkapita dan Inflasi Kota Cilegon
Tahun 2006 - 2016

Tahun	PDRB (Triliun Rupiah)	PDRB Perkapita (Juta Perkapita/Tahun)	Inflasi (%)
2006	14,50	43,71	7,44
2007	16,04	47,44	6,31
2008	18,01	52,43	12,96
2009	19,98	54,48	3,11
2010	22,31	59,56	6,12
2011	34,49	89,60	2,35
2012	38,22	97,15	3,91
2013	61,96	168,90	7,98
2014	70,45	172,79	9,93
2015	77,96	189,19	3,94
2016	82,42	196,84	4,22

Sumber : BPS Kota Cilegon

Berdasarkan tabel 1.3 terlihat bahwa pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kota Cilegon menunjukkan pertumbuhan yang meningkat setiap tahunnya. Selama periode tahun 2013 – 2016, struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Cilegon didominasi oleh kelompok lapangan usaha sekunder yang terlihat dari besarnya peranan kelompok lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kota Cilegon. Tahun 2016 kelompok lapnaga usaha sekunder memberikan sumbangan sebesar 70,04% , serta kelompok lapangan usaha primer dan tersier masing – masing sebesar 0,36% dan 29,60%.

Serta laju pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan mencapai 1,61% dari tahun 2010 sampai dengan 2016.

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Kota Cilegon Tahun 2006 - 2016

Tahun	Jumlah Penduduk
2006	331.667
2007	338.027
2008	343.599
2009	349.162
2010	374.559
2011	385.720
2012	392.341
2013	398.304
2014	405.303
2015	412.106
2016	418.705

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon

Kota Cilegon merupakan Kota yang paling sedikit jumlah penduduknya di Provinsi Banten. Menurut hasil sensus penduduk (SP) 1990 penduduk Cilegon berjumlah 226,1 ribu jiwa, dan dari hasil SP 2000 jumlah penduduk sebesar 294,9 ribu jiwa. Pada tahun SP 2010 dari hasil akhir tercatat sebesar 373,4 ribu jiwa penduduk Kota Cilegon. Selang tahun 2010 – 2016 jumlah penduduk menjadi 418.705 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,61 persen per tahun.

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang peneliti maka peneliti mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cilegon?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cilegon?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cilegon?
4. Bagaimana pengaruh jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cilegon?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi dan Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Cilegon. Adapun batasan dari objek penelitian ini adalah:

- (1) Rasio yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan adalah rasio upaya fiskal;
- (2) Objek penelitian adalah Kota yang ada di Kota Cilegon dari tahun 2001 sampai dengan 2016.

Selain berdasarkan rumusan masalah dari permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengukur seberapa besar pengaruh PDRB terhadap pajak daerah Kota Cilegon.
2. Untuk mengukur seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap pajak daerah Kota Cilegon.
3. Untuk mengukur seberapa besar pengaruh inflasi terhadap pajak daerah Kota Cilegon.
4. Untuk mengukur seberapa besar pengaruh jumlah industri terhadap pajak daerah Kota Cilegon.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mengenai analisis pengaruh pajak daerah terhadap PAD di Kota Cilegon diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak – pihak terkait. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah.

1. Bagi peneliti, melalui penelitian ini peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh sewaktu duduk di bangku perkuliahan.
2. Bagi pemerintah Kota Cilegon, sebagai bahan kebijakan pengambilan keputusan terutama dalam upaya peningkata pajak daerah Kota Cilegon

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Cilegon untuk memahami mengenai seberapa besar penerimaan pajak daerah Kota Cilegon.
4. Bagi peneliti sesudah, penelitian ini dapat menjadi referensi dan menjadi sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Haniz (2013) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Tegal dari tahun 1991 sampai dengan 2010. Metode yang dilakukan yaitu metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diantaranya adalah data penerimaan pajak daerah, wajib pajak, pendapatan perkapita, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa wajib pajak, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi Kota Tegal dari tahun 1991 sampai dengan 2010 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal, sedangkan pengaruh inflasi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal.

Nastiti (2015) meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten Madiun dari tahun 1993 sampai dengan 2014. Analisis yang digunakan untuk pengaruh PDRB, inflasi dan jumlah penduduk terhadap pajak daerah di Kabupaten Madiun digunakan model regresi berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Hasil analisa dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Madiun.

Faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Surabaya oleh Arianto (2014) penelitian ini menggunakan model

regresi berganda dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surabaya, sedangkan inflasi menunjukkan pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surabaya. Hasil uji koefisien determinasi juga menunjukkan bahwa pajak daerah dapat dijelaskan oleh ketiga faktor tersebut.

Tahwin (2013) meneliti mengenai identifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Rembang untuk periode 1992 – 2008. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder dan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa pendapatan per kapita, jumlah wisatawan dan produk pertambangan kelompok c memiliki dampak positif dan signifikansi terhadap penerimaan pajak. Jumlah industri dan hotel pemesanan kamar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak Kabupaten Rembang. Variabel pendapatan per kapita memberikan pengaruh yang dominan terhadap lokal pajak penghasilan Kabupaten Rembang.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah

daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.³ Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pada pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai atau membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah atau penyerahan wewenang Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Idealnya suatu perimbangan keuangan pusat dan daerah terjadi apabila setiap tingkat pemerintahan independen dalam bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Menurut Kaho (2001 : 136) salah satu kriteria penting untuk

³ Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah *self supporting* dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya.⁴ Daerah otonom adalah wilayah yang didalamnya terdapat kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (5) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). McMaster mengemukakan bahwa pemerintah daerah untuk mengatasi masalah fiskal dapat melakukan tiga strategi besar, sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan melalui bermacam-macam retribusi, meningkatkan pajak daerah dan membuat pajak-pajak baru serta retribusi, dan menjual aset-aset.
2. Memperbaiki efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemerintah daerah melalui program-program perbaikan produktivitas, lebih meningkatkan efisiensi dalam perencanaan dan penganggaran,

⁴ Kaho, Josef Riwu (2001). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada hal 136

menggunakan pendekatan biaya rendah, atau melalui menyimpan biaya melalui penggunaan barang- barang privat.

3. Mengurangi aktivitas pemerintah daerah dengan memperluas partisipasi dari pihak swasta dalam pembagian pelayanan bagi masyarakat.

Strategi yang diutarakan McMaster di atas menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan oleh daerah untuk mengatasi masalah fiskal. Oleh karena itu perlu dibahas pula mengenai definisi pajak daerah⁵.

Ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap penerimaan dari pemerintah pusat disatu sisi dan rendahnya peranan PAD dalam penerimaan daerah disatu sisi akan membawa konsekuensi terhadap rendahnya kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran daerah. Kondisi ini tentu saja sangat menyulitkan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi secara nyata. Menurut (Kuncoro, 2004), setidaknya ada lima penyebab utama rendahnya PAD yang pada gilirannya menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat, yaitu:

⁵ James McMaster (1994). *Urban Financial Management*. Washington D.C: The World Bank, hal.1.

1. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
2. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif dan *buoyant* baik pajak langsung dan tak langsung, ditarik oleh pusat;
3. Kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan;
4. Bersifat politis, adanya kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi maka ada kecendrungan terjadi disintegrasi dan separatisme;
5. Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.⁶

Selanjutnya Mardiasmo (2000 : 8) telah pula menguraikan bahwa:

“Potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel yang dapat di kendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan

⁶ Mudrajat, Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga hal 86

daerah”. Artinya bahwa potensi memiliki factor yang sangat mempengaruhi sumber penerimaan.

Menurut Mardiasmo (2004 : 146), pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*).⁷

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

2.2.2 Pajak Daerah

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸ Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya⁹ seperti: Pajak reklame,

⁷ Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Andi. Hal 146

⁸ Undang-Undang Nomor : 28 tahun 2009, pasal 1 ayat-10

⁹ Mardiasmo (1999). *Perpajakan*, edisi ke-7. Yogyakarta: Penerbit Andi. hal. 5.

Pajak Hiburan Pajak Hotel dan Restoran, dan lain-lain. Pengertian Pajak Daerah sendiri menurut Davey adalah:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah itu sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah;
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasil dengan atau dibebani pungutan oleh Pemerintah Daerah.¹⁰

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan. Terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ada 2 jenis

¹⁰ K.J Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah : Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga* diterjemahkan oleh Amanullah, (Jakarta: UI-Press, 1988), hal. 39.

pendapatan pajak yaitu: pajak untuk provinsi dan pajak untuk untuk kabupaten/kota (Halim, 2012).

Jenis Pajak Provinsi Terdiri Dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Pajak kendaraan di air;
- c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Bea balik nama kendaraan di air;
- e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- f. Pajak Air Permukaan; dan
- g. Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C;
- g. Pajak lingkungan;
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- i. Pajak Parkir;
- j. Pajak Sarang Burung Walet;

- k. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- l. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kewenangan pada kegiatan pemungutan pajak daerah merupakan kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya.

2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto

Seperti yang diterangkan dalam BPS pada tahun 2017, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara tanpa memperhatikan faktor produksi residen maupun non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, serta dapat menggambarkan struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi.

2.2.4 Inflasi

Definisi

Inflasi adalah kecenderungan harga untuk meningkat secara terus-menerus dan menyeluruh. Kenaikan harga satu jenis ataupun dua jenis bahan pokok tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali apabila kenaikan harga tersebut meluas atau berdampak terhadap kenaikan barang lainnya seperti makanan, minuman, rokok, biaya kesehatan, biaya pendidikan, rekreasi, transportasi, olahraga, komunikasi, dan jasa keuangan. Sehingga terdapat tiga komponen yang harus dipenuhi sebagai syarat inflasi menurut Boediono (1999) yaitu:

- a. Kenaikan harga, yaitu apabila harga suatu komoditas menjadi lebih tinggi dari harga periode sebelumnya.
- b. Bersifat umum, yaitu kenaikan harga komoditas yang dikonsumsi masyarakat secara umum.
- c. Berlangsung terus menerus, kenaikan harga yang bersifat umum tidak akan memunculkan inflasi, jika hanya terjadi sesaat. Misalnya kenaikan harga pada saat lebaran atau tahun baru tidak dapat dikatakan sebagai inflasi.

Kebalikan dari inflasi adalah deflasi. Deflasi adalah suatu keadaan dimana jumlah barang yang beredar melebihi jumlah uang yang

beredar sehingga harga barang-barang menjadi turun, dan nilai uang menjadi naik.

Efek Inflasi

Menurut Nopirin (2010) inflasi dapat menimbulkan efek bagi pemerintahan maupun kondisi politik. Efek-efek inflasi tersebut adalah:

a. Efek terhadap pendapatan

Seseorang yang menumpuk uang dan seseorang yang memiliki pendapatan tetap akan dirugikan oleh inflasi. Namun beberapa pihak yang memperoleh pendapatan dengan presentase lebih besar dibandingkan laju inflasi dan pihak yang memiliki kekayaan bukan uang yang mengalami peningkatan nilai dengan presentase lebih besar dibandingkan dengan laju inflasi justru akan mengalami keuntungan. Sebagai contoh seseorang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji tetap Rp 3.000.000 pada kondisi normal sebelum inflasi dapat menggunakan gajinya untuk membeli berbagai barang maupun jasa, namun dengan adanya inflasi gaji tersebut hanya dapat dibelanjakan terbatas pada beberapa barang dan jasa.

b. Efek terhadap efisiensi

Permintaan terhadap barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain karena inflasi, yang kemudian

mendorong kenaikan produksi barang tersebut. Inflasi dapat mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien. Barang akan didistribusikan lebih besar kepada kelompok yang mampu memenuhi harga yang ditentukan pada saat inflasi.

c. Efek terhadap output

Inflasi dapat menyebabkan kenaikan produksi. Biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi cukup tinggi, dampak yang akan ditemukan adalah sebaliknya, yakni penurunan output yang disebabkan oleh produsen tidak mampu memenuhi biaya produksi suatu barang ataupun jasa.

2.2.5 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk menurut teori Hansen mengenai stagnansi (*secular stagnation*) dalam Devas (1989) yang menerangkan bahwa bertambahnya penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi. Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi. Pertama dari segi permintaan dan kedua dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk tidaklah selalu merupakan penghambat

pembangunan ekonomi, jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Berdasarkan uraian tersebut pertumbuhan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah.

2.2.6 Jumlah Industri

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan menjelaskan kriteria pengelompokan industri, yaitu industri kecil, menengah, dan besar. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal kekayaan bersih perusahaan sampai dengan Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil. Bila modal kekayaan bersih perusahaan seluruhnya diatas Rp 200.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Menengah. Bila modal kekayaan bersih perusahaan seluruhnya diatas Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar. Semakin banyak jumlah industri yang berkembang, pajak daerah yang dipungut akan meningkat yaitu Pajak Daerah.

2.2.7 Hubungan Variabel Dependen dengan Variabel Independen

2.2.7.1 Pengaruh PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Dengan meningkatnya PDRB maka akan semakin tinggi pula ekonomi daerah tersebut dan bias membayar pajak dengan tertib dan memungkinkan daerah untuk mewajibkan pajak yang lebih tinggi dari sebelumnya. Menurut Hariyuda (2009) menjelaskan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

2.2.7.2 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Jumlah penduduk merupakan variabel yang berpengaruh besar dalam hasil produksi dan jasa. Menurut Arianto (2014) menjelaskan pengujiannya jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan sebagai subjek pajak akan mengeluarkan penghasilannya untuk membayar pungutan pajak.

2.2.7.3 Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Dengan adanya inflasi tidak hanya akan berpengaruh pada kenaikan harga tetapi akan berimbas pada kondisi ekonomi lainnya. Perkembangan inflasi mempengaruhi laju perekonomian suatu

negara. Setiap negara akan berusaha agar keuangannya stabil sehingga kegiatan perekonomian masyarakat dapat berkembang. Dalam penelitian Tamara (2009) menjelaskan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi perolehan pajak daerah di Kota Bandung.

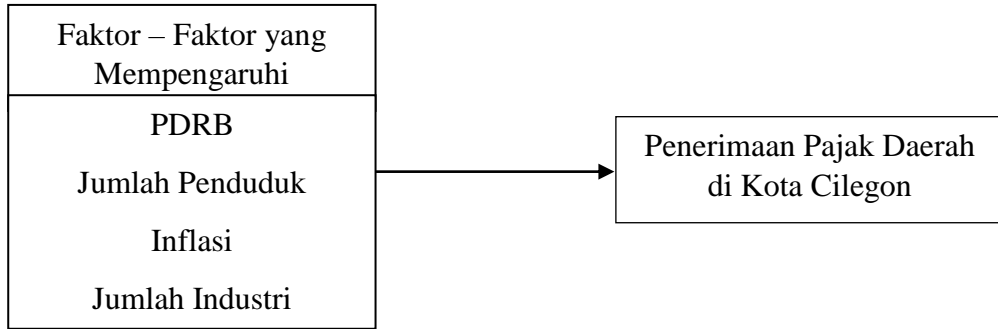
2.2.7.4 Pengaruh Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Losch dalam Tarigan (2005) Perusahaan besar akan meramalkan perubahan yang akan terjadi di daerah perusahaan/industry beroperasi, sehingga industry akan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan keuntungan mereka. Ketika semua faktor penentuan lokasi telah terpenuhi maka industri akan melakukan kegiatan industry di daerah tersebut. Menurut Nurmayasari (2010) menyatakan jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasar landasan teori yang telah diperoleh yang menjadi rujukan konseptual variabel penelitian maka dapat dilihat bahwa adanya hubungan antara PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi dan Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Dengan demikian dapat dirumuskan melalui logika penelitian sebagai berikut.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dari rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka rumusan hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Diduga PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kota Cilegon.
2. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kota Cilegon.
3. Diduga Inflasi berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kota Cilegon.
4. Diduga Jumlah Industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kota Cilegon.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Alasan penggunaan metode pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini adalah penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pajak daerah. Metode kuantitatif yang digunakan ialah model regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah Kota Cilegon. Metode yang dipilih dalam analisis regresi berganda adalah metode OLS (*Ordinary Least Square*).

Sebagai hal yang umum konsep dibangun dari teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan variabel- variabel yang akan diteliti (deduksi). Diharapkan dalam penelitian ini peneliti dapat memahami faktor – faktor yang berpengaruh terhadap pajak daerah.

3.1.1 Obyek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti/dikaji yang dapat berupa perilaku orang atau dokumen yang memberikan informasi atau data penelitian yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam hal ini, objek penelitian yang dikaji penulis adalah faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Cilegon.

3.1.2 Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini, subjek penelitian yang dipilih penulis adalah pemerintah daerah Kota Cilegon sebagai penyelenggara dan pihak pengelola perpajakan Kota Cilegon.

3.1.3 Teknik Pengumpulan Data

i. Studi Lapangan

Penelitian ini berdasarkan teknik pengumpulan data merupakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*). Studi lapangan guna mengumpulkan data-data mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah yang dapat diperoleh dari laporan realisasi APBD.

ii. Studi Pustaka

Dalam hal ini peneliti menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa sumber dalam studi kepustakaan dalam penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Perpajakan No. 7 Tahun 1986 dan studi literatur dilakukan melalui pengkajian berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel di media cetak ataupun elektronik baik yang

ditulis oleh ahli perpajakan atau oleh sumber lain dengan tujuan untuk mencari konsep dan teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dan akan dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian ini.

3.2 Model Regresi

Maka pajak daerah diduga dipengaruhi PDRB, jumlah penduduk, inflasi, jumlah industri dan jumlah kendaraan. Maka model regresinya sebagai berikut,

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it}$$

dimana :

Y_t adalah Pajak Daerah Kota Cilegon tahun 2001 sampai dengan 2016

X_{1it} adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cilegon tahun 2001 samapai dengan 2016

X_{2it} adalah Jumlah Penduduk Kota Cilegon tahun 2001 sampai dengan 2016

X_{3it} adalah Inflasi Kota Cilegon tahun 2001 sampai dengan 2016

X_{4it} adalah Jumlah Industri Kota Cilegon tahun 2001 sampai dengan 2016

3.3 Metode Analisis

3.3.1 Analisis deskriptif

Penelitian ini merupakan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan populasi dan sampel kabupaten atau kota di Kota Cilegon. Data penelitian ini bersumber dari laporan APBD pemerintah daerah Kota Cilegon yakni data PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan lain-lain yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon.

3.3.2 Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas adalah uji statistik non parametric One Kolmogorov Smirnov. Jika angka probabilitas $< \alpha = 0,05$ maka variabel tidak terdistribusi secara normal. Sebaliknya, bila angka probabilitas $> \alpha = 0,05$ maka variabel terdistribusi secara normal (Ghozali, 2005).

3.3.3 Uji T (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji ada atau tidaknya signifikan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang diuji pada signifikansi $\alpha = 0,005$ (5%) dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Uji ini membandingkan antara t hitung dengan t tabel dengan

menggunakan hipotesis $H_0 : b_i \neq b$ dan $H_a : b_i = b$. Apabila t hitung lebih besar dari t tabel, maka H_0 di tolak dan H_a diterima, dapat disimpulkan variabel dependen mempengaruhi variabel independen.

3.3.4 Uji F (Simultan)

Uji F ini digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independennya yang dimaksudkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (5%) Uji ini membandingkan F hitung dengan F tabel, apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka H_0 di tolak, dapat disimpulkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap nilai variabel dependen.

3.3.5 Analisis Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang ditunjukkan dengan besarnya R^2 . Semakin tinggi nilai R^2 hal tersebut mempunyai arti bahwa model regresi yang digunakan semakin baik, karena sebagian besar varians dari variabel bebas dapat menjelaskan varians dari variabel terikat. Dalam hal ini penulis ingin melihat seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD Kota Cilegon.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Kota Cilegon sebagai kota yang terletak pada 5°52'24" - 6°04'07" Lintang Selatan dan 105°54'05" - 106°05'11" Bujur Timur. Kota yang terletak paling barat di Pulau Jawa ini secara administratif menjadi Kotamadya Tingkat II sejak 27 April 1999. Kota Cilegon berbatasan langsung dengan Kecamatan Bojonegara (Kabupaten Serang) pada sebelah utara, pada bagian timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Kramatwatu (Kabupaten Serang), sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Anyer dan Kecamatan Mancak (Kabupaten Serang), dan sebelah barat Kota Cilegon berbatasan langsung dengan Selat Sunda.

Dengan luas wilayah ± 17.550 Ha saat ini terbagi atas 8 kecamatan yaitu: Kecamatan Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Pulomerak, Kecamatan Grogol, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Citangkil, Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Cibeber. Jumlah penduduk Kota Cilegon per-tahun 2016 berjumlah 418.705 dengan jumlah penduduk laki – laki sebesar 213.803 jiwa dan perempuan tercatat sebesar 204.902 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Kota Cilegon terus menambah setiap tahunnya dan cenderung stabil laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2012 – 2016 sebesar 1,02%. Dengan jumlah penduduk yang tinggi membuat Kota Cilegon menjadi kota dengan penduduk terbesar ke-4 di Provinsi Banten.

4.2 Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yang dilakukan akan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Cilegon. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Cilegon dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Cilegon.

Tabel 4.1

Penerimaan Pajak Daerah, PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Jumlah Perusahaan di Kota Cilegon Tahun 2001 - 2016

Tahun	Pajak Daerah (Rupiah)	PDRB (Triliun Rupiah)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Inflasi (%)	Jumlah Perusahaan (Industri)
2001	22.830.191.298,00	7,21	301.225	12,75	72
2002	39.838.876.465,00	7,72	309.097	9,68	67
2003	47.770.985.834,00	8,28	331.024	5,21	68
2004	59.967.239.200,00	8,88	334.185	6,40	64
2005	66.018.469.438,00	9,44	335.913	15,24	72
2006	77.001.182.988,00	9,97	339.316	7,67	51
2007	73.410.440.255,00	10,51	338.027	6,31	72
2008	79.545.273.663,00	11,05	343.599	12,96	69
2009	82.328.146.411,00	11,58	349.162	3,11	72
2010	84.928.180.856,00	12,19	374.559	6,12	76
2011	172.965.160.026,00	18,23	385.720	2,35	77
2012	147.686.642.561,00	19,47	392.341	3,91	77
2013	177.144.972.228,00	20,62	398.304	7,98	77
2014	340.323.435.803,00	21,61	405.303	9,93	81
2015	412.600.922.492,00	22,58	412.106	3,94	79
2016	392.549.543.855,00	23,83	418.705	4,22	79

Sumber : BPS Kota Cilegon

Berdasarkan tabel diatas penerimaan pajak daerah Kota Cilegon tahun 2001 – 2016 cenderung mengalami peningkatan secara terus –

menerus. Dapat dilihat penerimaan pajak daerah pada tahun 2001 sebesar 22.830.191.298 rupiah menjadi 392.549.543.855 pada tahun 2016. Dan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 103,66% dengan jumlah penerimaan pajak daerah sebesar 172.965.160.026 rupiah.

PDRB Kota Cilegon tahun 2001 – 2016 cenderung mengalami peningkatan secara terus – menerus. Dapat dilihat PDRB pada tahun 2001 sebesar 7,21 triliun rupiah menjadi 23,83 triliun rupiah pada tahun 2016. Dan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 49,55% dengan PDRB sebesar 18,23 triliun rupiah.

Jumlah penduduk Kota Cilegon tahun 2001 – 2016 cenderung mengalami peningkatan secara terus – menerus. Dapat dilihat jumlah penduduk pada tahun 2001 sebesar 301.225 jiwa menjadi 418.705 jiwa pada tahun 2016. Dan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 1,07% dengan jumlah penduduk sebesar 374.559 jiwa.

4.3 Analisis Data dan Pembahasan

Pada penelitian ini dalam menentukan model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ini didasari pada uji MacKinnon, White, dan Davidson (MWD).

Tabel 4.2

Hasil Uji MWD Linier

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Z1	-7.84E+10	7.91E+10	-0.991090	0.3450
R-squared	0.897383			

Sumber : Hasil pengolahan menggunakan Eviews 10

Tabel 4.3

Hasil Uji MWD Log Linier

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Z2	3.67E-12	4.30E-12	0.853709	0.4132
R-squared	0.954606			

Sumber : Hasil pengolahan menggunakan Eviews 10

4.3.1 Hasil Uji MWD

Berdasarkan hasil uji MWD, dilihat dari variabel Z1 yang menunjukkan hasil nilai 0.3450 dimana lebih dari $\alpha = 5\%$ maka dapat disimpulkan tidak signifikan atau gagal menolak hipotesis nol dan Z2 yang menunjukkan hasil nilai 0.4132 dimana lebih dari $\alpha = 5\%$ maka dapat disimpulkan tidak signifikan atau menerima hipotesis alternatif. Maka keputusan yang tepat untuk menggunakan model pada penelitian ini yaitu model linier dan log linier sama baiknya atau layak digunakan. Jika model linier dan log linier layak digunakan maka dapat dilihat nilai determinasi *R – square* (R^2) yang lebih tinggi, maka model yang dapat digunakan adalah log linier.

Tabel 4.4
Hasil Uji Log Linier

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.272.195	1.981.085	-2.156.492	0.0540
LOG(X1)	0.377877	0.184972	2.042.894	0.0658
LOG(X2)	5.477.238	1.607.732	3.406.811	0.0059
X3	-0.001270	0.018562	-0.068429	0.9467
LOG(X4)	-0.710406	0.639508	-1.110.863	0.2903
R-squared	0.950353			
Adjusted R-squared	0.932300			
F-statistic	5.264.124			
Prob (F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil pengolahan menggunakan Eviews 10

Hasil regresi log linier berganda yang didapat adalah :

$$\begin{aligned} \text{Log(Pajak Daerah)} &= -42.72195 + 0.414276 \text{ Log(PDRB)} + 5.085388 \\ &\quad \text{Log(Jumlah Penduduk)} - 0.062361 \text{ Inflasi} - \\ &\quad 0.718148 \text{ Log(Jumlah Industri)} \end{aligned}$$

Terlihat koefisien $\beta_0 = -42.72195$ yang mengandung arti apabila PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi dan Jumlah Industri sebesar 0 maka Pajak Daerah sebesar -42.72195 persen. $\beta_1 = 0.414276$ yang mengandung arti setiap peningkatan PDRB sebesar 1% akan diikuti peningkatan penerimaan Pajak Daerah sebesar 0.414276% dengan asumsi Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Jumlah Industri tetap, maka PDRB berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah. $\beta_2 = 5.085388$ yang mengandung arti setiap peningkatan Jumlah Penduduk sebesar 1% akan diikuti peningkatan

penerimaan Pajak Daerah sebesar 5.085388% dengan asumsi PDRB, Inflasi, dan Jumlah Industri tetap, maka Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah. $\beta_3 = -0.062361$ yang mengandung arti setiap peningkatan Inflasi sebesar 1% akan diikuti penurunan Pajak Daerah sebesar 0.062361% dengan asumsi PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Industri tetap, maka Inflasi berpengaruh negatif terhadap Pajak Daerah. $\beta_4 = -0.718148$ yang mengandung arti setiap peningkatan Jumlah Industri sebesar 1% akan diikuti penurunan Pajak Daerah sebesar 0.718148% dengan asumsi PDRB, Jumlah Penduduk, dan Inflasi tetap, maka Inflasi berpengaruh negatif terhadap Pajak Daerah.

4.3.2 Uji Statistik :

4.3.2.1 Uji T

Uji T adalah menguji ada atau tidaknya signifikan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang diuji pada signifikansi $\alpha = 5\%$ dan 10% dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Melihat berdasarkan probabilitas variabel dengan menggunakan hipotesis $H_0 : b_i \neq b$ dan $H_a : b_i = b$. Apabila probabilitas variabel lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka H_0 di tolak dan H_a diterima, dapat disimpulkan variabel dependen mempengaruhi variabel independen.

- 1) Variabel PDRB (X_1) menunjukkan besar probabilitas sebesar 0.0658 dengan diambil tingkat signifikansi $\alpha = 10\%$ maka menolak

Ho, karena nilai probabilitas lebih kecil dari pada tingkat signifikansi. Dengan demikian maka variabel independen PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pajak daerah pada tingkat signifikansi $\alpha = 10\%$.

- 2) Variabel Jumlah Penduduk (X2) menunjukkan besar probabilitas sebesar 0.0059 dengan diambil tingkat signifikansi $\alpha = 1\%$, 5%, dan 10% maka menolak Ho, karena nilai probabilitas lebih kecil dari pada tingkat signifikansi. Dengan demikian maka variabel independen PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pajak daerah pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$.
- 3) Variabel inflasi (X3) menunjukkan besar probabilitas sebesar 0.9467 dengan diambil tingkat signifikansi $\alpha = 1\%$, 5%, dan 10% maka gagal menolak Ho, karena nilai probabilitas lebih besar dari pada tingkat signifikansi. Dengan demikian maka variabel independen Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Pajak Daerah pada tingkat signifikansi $\alpha = 1\%$, 5%, dan 10%.
- 4) Variabel Jumlah Industri (X4) menunjukkan besar probabilitas sebesar 0.2903 dengan diambil tingkat signifikansi $\alpha = 1\%$, 5%, dan 10% maka gagal menolak Ho, karena nilai probabilitas lebih besar dari pada tingkat signifikansi. Dengan demikian maka variabel independen Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap variabel dependen pajak daerah pada tingkat signifikansi $\alpha = 1\%$, 5% , dan 10% .

4.3.2.2 Uji F

Uji F ini digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independennya yang dimaksudkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Uji ini membandingkan F hitung dengan F tabel, apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka H_0 ditolak, dapat disimpulkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap nilai variabel dependen. Diketahui F tabel dengan mencari berdasarkan numerator dan denominator maka dihasilkan F tabel sebesar 3,36 dan hasil regresi log linier menunjukkan F hitung sebesar 53.71518 maka F hitung lebih besar dari F tabel dengan signifikansi $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak. Dengan demikian variansi variabel independen (PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Jumlah Industri) secara bersama – sama mempengaruhi variabel dependen (Pajak Daerah), maka model layak untuk digunakan.

4.3.2.3 Analisis Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang ditunjukkan dengan besarnya *R – square* (R^2). Semakin tinggi nilai *R – square* (R^2) hal tersebut mempunyai arti bahwa model regresi yang digunakan

semakin baik, karena sebagian besar varians dari variabel bebas dapat menjelaskan varians dari variabel terikat. Nilai determinasi $R - square$ (R^2) menunjukkan 0.951297 (95,12%) yang berarti bahwa variasi variabel independen (PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi dan Jumlah Industri) dapat mampu menjelaskan variabel dependennya melalui model ini sebesar 95,12% sisanya yaitu 4,88% dijelaskan oleh variabel – variabel lain diluar model.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam suatu model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel independen maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen terganggu.

Tabel 4.5

Hasil Uji Multikolinearitas

	PDRB	Jumlah Penduduk	Inflasi	Jumlah Industri
PDRB	1	0,850252	-0,226323	0,613576
Jumlah Penduduk	0,850252	1	-0,487346	0,668354
Inflasi	-0,226323	-0,487346	1	-0,20099
Jumlah Industri	0,613576	0,668354	-0,20099	1

Sumber : Hasil pengolahan menggunakan Eviews 10

Uji Multikolinearitas dapat dilakukan dengan membandingkan r^2 dengan R^2 , apabila r^2 lebih kecil dibanding R^2 maka tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Berikut hasil uji multikolinearitas :

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	r^2	R^2	Kesimpulan
PDRB - Jumlah Penduduk	0,850252	0,951297	Tidak Terdapat Multikolinearitas
PDRB - Inflasi	-0,226323	0,951297	Tidak Terdapat Multikolinearitas
PDRB - Jumlah Industri	0,613576	0,951297	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Jumlah Penduduk - Inflasi	-0,487346	0,951297	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Jumlah Penduduk - Jumlah Industri	0,668354	0,951297	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Inflasi - Jumlah Industri	-0,20099	0,951297	Tidak Terdapat Multikolinearitas
PDRB - Jumlah Penduduk	0,850252	0,951297	Tidak Terdapat Multikolinearitas
PDRB - Inflasi	-0,226323	0,951297	Tidak Terdapat Multikolinearitas
PDRB - Jumlah Industri	0,613576	0,951297	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Jumlah Penduduk - Inflasi	-0,487346	0,951297	Tidak Terdapat Multikolinearitas

Sumber : Hasil pengolahan menggunakan Eviews 10

4.3.3.2 Uji Heteroskedastisitas Breusch-Pagan-Godfrey

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.308.866	Prob. F(4,11)	0.3259
Obs*R-squared	5.159.534	Prob. Chi-Square(4)	0.2713
Scaled explained SS	2.350.379	Prob. Chi-Square(4)	0.6716

Sumber : Hasil pengolahan menggunakan Eviews 10

4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas Glejser

Tabel 4.8

Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser

F-statistic	2.372.316	Prob. F(4,11)	0.1159
Obs*R-squared	7.410.136	Prob. Chi-Square(4)	0.1157
Scaled explained SS	4.602.352	Prob. Chi-Square(4)	0.3306

Sumber : Hasil pengolahan menggunakan Eviews 10

Berdasarkan hasil uji Breusch-Pagan-Godfrey menunjukkan nilai probabilitas F hitung 0.2713 dan uji Glejser menunjukkan nilai probabilitas F hitung 0.1157 yang dimana dari kedua uji heteroskedastisitas menunjukkan lebih besar dari signifikansi $\alpha = 5\%$.

Dengan ini menjelaskan variabel independen lebih besar daripada $\alpha = 5\%$ sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada data ini.

4.3.3.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi melihat apakah ada korelasi antara satu periode t dengan periode sebelumnya.

Tabel 4.9

Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	0.343642	Prob. F(2,9)	0.7181
Obs*R-squared	1.135.154	Prob. Chi-Square(2)	0.5669

Sumber : Hasil pengolahan menggunakan Eviews 10

Nilai probabilitas F atau probabilitas F hitung menunjukkan nilai 0.5669. Maka Nilai Probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, sehingga berdasarkan uji hipotesis gagal menolak H_0 artinya tidak terdapat masalah autokorelasi.

4.4 Interpretasi Hasil Pengolahan Data

4.4.1 Pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah

PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah yang sesuai dengan hipotesis. Besar koefisien variabel PDRB sebesar 0.377877, yang menjelaskan bahwa apabila PDRB naik 1 persen, maka penerimaan pajak daerah akan naik sebesar 0.377877 persen dengan asumsi variabel selain PDRB tetap atau konstan. Hal ini juga sesuai dengan teori yang menyatakan semakin besar PDRB maka pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah akan semakin tinggi. Bila pertumbuhan daerah tinggi maka pendapatan masyarakat akan ikut meningkat dan kesejahteraan akan ikut meningkat. Dengan naiknya pendapatan maka tingkat konsumsi juga akan meningkat. Hal ini berdampak dengan penerimaan pajak yang akan ikut meningkat, karena kemampuan seseorang untuk membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurrohman (2010) yang menyatakan bahwa variabel PDRB secara positif berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah. Dari penelitian ini nilai probabilitas variabel PDRB sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari

0,05. Sehingga hasil penelitian menyatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Daerah.

4.4.2 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah

Jumlah Penduduk menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah yang sesuai dengan hipotesis dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Hasil ini juga sesuai dengan teori yang menyatakan tingkat pertumbuhan penduduk akan disertai dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk sebagai bagian dari subjek yang mendorong dalam penerimaan pajak yang dimana membayarkan sebagian penghasilannya untuk pemungutan pajak.

Kondisi ini sejalan dengan penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Norrohman (2010) yang menyatakan bahwa variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas variabel sebesar 0.9480 yang dimana lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 1\%$, 5% , dan 10% . Hal ini dijelaskan bahwa tidak semua penduduk Kota Surakarta terdaftar sebagai wajib pajak yang mempunyai kewajiban membayar pajak.

4.4.3 Pengaruh Inflasi terhadap Pajak Daerah

Inflasi Kota Cilegon berhubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada tingkat signifikansi α

= 5%. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi berhubungan negative dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Hal ini sejalan dengan penelian Nurrohman (2010) yang menyatakan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta. Dari penelitian ini nilai probabilitas variabel inflasi sebesar 0,8375 dimana lebih besar dari signifikansi $\alpha = 5\%$. Sehingga hal ini menyebabkan variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta. Ketika harga barang naik atau turun, tidak mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.

Ketidaksesuaian antara teori dengan hasil penelitian yang menyatakan inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena inflasi menyebabkan kenaikan harga barang secara terus menerus yang berdampak terhadap berkurangnya daya beli masyarakat. Dalam hal ini yang dirugikan adalah pekerja yang hanya mendapatkan penghasilan tetap. Namun bagi pekerja yang memiliki penghasilan yang tinggi, dampak inflasi tidak begitu berpengaruh karena berapapun tinggi harga suatu barang maka akan tetap dibeli karena sifat konsumtif manusia. Maka keuntungan yang diperoleh perusahaan tetap stabil dan penerimaan pajak yang dipungut pemerintah terhadap perusahaan juga akan relatif stabil. Sehingga dapat disimpulkan kenaikan inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak daerah.

4.4.4 Pengaruh Jumlah Industri terhadap Pajak Daerah

Jumlah industri tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah industry berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Dilihat dari banyaknya jumlah industri yang tercatat dalam BPS yang terlihat tidak stabil dan cenderung turun semisal pada tahun 2014 sebanyak 81 industri menurun menjadi 79 industri di tahun 2015 dan 2016 dikarenakan menurut BPS Banten, pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang (IBS) yang terjadi di Banten sempat melonjak ke angka 10,97% pada kuartal I/2013 *year-on-year* (yoy), kemudian berangsur menyusut hingga -4,26% pada kuartal I/2014, dan kembali naik tipis 2,59% pada kuartal I/2015 lalu menurun ke angka -0,96% (yoy), atau berkebalikan dengan kenaikan IBS secara nasional yang naik 4,08% pada kuartal I/2016.

Penurunan ini banyak disebabkan oleh industri makanan yang menyumbang penurunan sebesar 9,85% (yoy) dan juga industry tekstil sebesar 2,55 % di daerah Banten yang juga berdampak ke Kota Cilegon, serta Kota Cilegon lebih banyak bergantung dengan industri pengolahan yang dominan berorientasi pada ekspor impor belum dapat menunjukkan hasil yang positif dikarenakan masih bergantungnya dengan bahan baku

impor dan sebagainya sehingga membuat beberapa perusahaan yang tidak bertahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pengaruh variabel PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi dan Jumlah Industri terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Cilegon pada tahun 2001 – 2016, maka hasil penelitian dapat diambil kesimpulan berikut :

1. Uji statistik melalui Uji T untuk menguji secara parsial bagaimana pengaruh variabel independen yaitu PDRB, jumlah penduduk, inflasi, dan jumlah industri terhadap variabel dependennya pajak daerah dapat disimpulkan bahwa PDRB dan jumlah penduduk mampu mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Cilegon, sedangkan variabel inflasi dan jumlah industry besar dan sedang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Cilegon tahun 2001 – 2016.
2. Uji secara simultan melalui Uji F menunjukkan pengaruh seluruh variabel independen PDRB, jumlah penduduk, inflasi, dan jumlah industri secara bersama – sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak yang ditunjukkan dengan nilai f hitung sebesar 53.71518 yang lebih besar dari f tabel sebesar 3,36.

3. Melalui analisis determinasi tingkat keeratan hubungan antara variabel independen dan dependen sebesar 0.951297 (95,12%). Berarti bahwa variabel independen PDRB, jumlah penduduk, inflasi dan jumlah industri dapat mampu menjelaskan variabel dependennya pajak daerah sebesar 95,12%. Sedangkan sisanya 4,88% dijelaskan oleh variabel – variabel diluar model.
4. Pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa variabel independen tidak terdapat masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.
5. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah yang sesuai dengan hipotesis. Hal ini juga sesuai dengan teori yang menyatakan semakin besar PDRB maka pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah akan semakin tinggi maka pendapatan masyarakat akan ikut meningkat dan kesejahteraan akan ikut meningkat. Maka semakin tinggi juga kemampuan seseorang untuk membayar pajak yang ditetapkan pemerintah.
6. Dari hasil penelitian diketahui jumlah penduduk terbukti kebenarannya memiliki pengaruh yang dominan terhadap pajak daerah dan sesuai dengan hipotesis penelitian. Hasil ini dapat dilihat dari nilai koefisien yang paling besar yaitu 5,477238, hal ini dikarenakan jumlah penduduk sebagai bagian dari subjek yang mendorong dalam penerimaan pajak yang dimana membayarkan sebagian penghasilannya untuk pemungutan pajak.

7. Perubahan Inflasi di Kota Cilegon menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah hal ini dikarenakan masyarakat yang berpenghasilan tinggi masih dapat menggunakan hasil produksi yang dihasilkan perusahaan, sehingga pajak yang dipungut terhadap perusahaan akan relatif stabil.
8. Jumlah industri tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, hal ini dikarenakan banyaknya jumlah industri yang tercatat dalam BPS yang terlihat tidak stabil dan cenderung turun semisal pada tahun 2014 sebanyak 81 industri menurun menjadi 79 industri di tahun 2015 dan 2016, dan dikarenakan Kota Cilegon lebih banyak bergantung dengan industri pengolahan yang dominan berorientasi pada ekspor impor belum dapat menunjukkan hasil yang positif dikarenakan masih bergantungnya dengan bahan baku impor dan sebagainya sehingga membuat beberapa perusahaan yang tidak bertahan.

5.2 Implikasi

1. Pada penelitian ini PDRB menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, maka penulis menyarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan PDRB. Maka dengan penambahan PDRB akan diikuti pula penambahan penerimaan pajak daerah.
2. Jumlah penduduk Kota Cilegon yang besar tentunya sangat berperan dalam penerimaan pajak daerah. Maka dengan memanfaatkan jumlah penduduk yang ada dengan melaksanakan pendataan terhadap subyek dan

obyek pajak daerah, maka wajib pajak ada dapat memberikan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cilegon.

3. Pemerintah daerah Kota Cilegon diharapkan dapat memperhatikan laju inflasi yang terjadi sehingga dapat menekean laju inflasi sehingga diharapkan dapat mendorong penerimaan pajak daerah.
4. Bagi penelitian selanjutnya untuk data menambah tahun dan variabel – variabel lain yang berhubungan dengan penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dkk. (2012), *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi ke-4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Arianto, P. S. (2014), “Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya”, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 3. p. 1-16.
- Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, *Cilegon Dalam Angka Tahun 2000 sampai dengan 2017*.
- Boediono. (1999), *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- Devas, Nick (1989), *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Ghozali, I. (2005), *Aplikasi dan Analisis Multivariate dengan SPSS*. In I. Ghozali. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, A. (2004), *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Refisi*. In A. Halim, UPP: AMD YKPN, Yogyakarta.
- Haniz, N. F. (2013), “Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal”, *Diponegoro Journal of Economics*, Vol.3. p. 1-13.
- Hariyuda, R. (2009), *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Usaha, Pertumbuhan PDRB dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan*

Pajak Daerah (Studi Kasus di Kota Kediri), Skripsi Program Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.

James McMaster (1994), *Urban Financial Management*, The World Bank, Washington D.C.

Kaho, Josef Riwu (2001), *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

K.J Davey (1998), *Pembiayaan Pemerintahan Daerah : Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga* diterjemahkan oleh Amanullah, UI Press, Jakarta.

Mardiasmo (2004), *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua)*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

_____ (1999). *Perpajakan Edisi ke-7*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo dan Makhfatih, Ahmad (2004), *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang. Laporan Akhir, Kerjasama Pemerintah Daerah Magelang dengan PAU-SE UGM*, Yogyakarta.

Mudrajad, Kuncoro (2004), *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta.

Nastiti, C. R. (2015), *Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 4, 1-19.

Nopirin (2010), *Ekonomi Moneter (4 ed.)*, BPFE. Yogyakarta.

- Nurmayasari, Dini (2010), “Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang”, Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Nurrohman, Alfian (2010), “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta (Tahun 1994-2007)”, Skripsi Program Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Rahdina, D.P. (2008), “Analisis Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok Pada Era Otonomi Daerah”, Skripsi Program Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Randria, Febby (2016), “Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010-2015”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 14, No. 01.
- Riduansyah, Mohammad (2003), “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah”, Makara, Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2.
- Ruswandi, Rina Rahwmawati (2009), “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang”, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Tahwin, M. (2013), “Identifikasi Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah”, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18. p. 1-8.
- Tamara, Ashad Darulmaslshah (2009), “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung (1998-2008)”,

Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi, Vol. 3, No. 2
November, Hal. 151-172.

Tarigan, Robinson M.R.P. (2005), *Ekonomi Regional Teori & Aplikasi*, PT.
Bumi Aksara, Jakarta


Tata Cara dan Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Ekonomi, Jurusan Ilmu
Ekonomi, Universitas Islam Indonesia 2016.

Wantara, A. (1997), “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pemerintah
Pusat DIY (1970 - 1992)”, *Kinerja - Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, No. 2.

Widarjono, Agus (2014), *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi ke-4*,
UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Surat Rekomendasi Penelitian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA CILEGON BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOMPLEK SUKMAJAYA MANDIRI KAVLING 7, JL. AHMAD YANI Tlp. (0254) 392967 Fax. (0254) 377 594 CILEGON</p>	 <small>Cert. No. FS 581617 ISO 9001 : 2008</small>
---	--	---

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/ 231 /SP/BPKAD

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon Berdasarkan surat Universitas Islam Indonesia tanggal 25 Januari 2018 Nomor: 005/DEK/10/Div.SDM/I/2018, Perihal: Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini:

MENGIJINKAN


Kepada :

Nama	: ANATOLY ADITYA SAPUTRA
Lembaga	: UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk : Melaksanakan Penelitian pada Bidang Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon, selama 1 (Satu) Bulan mulai tanggal 5 Februari s/d 5 Maret 2018

Demikian surat izin ini, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada tanggal : 2 Februari 2018
KEPALA BPKAD KOTA CILEGON


H.MAMAN MAULUDIN, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660727 199403 1 009

Tembusan:

1. Yth, Kepala Bidang Pajak Daerah BPKAD Kota Cilegon.
2. Yang bersangkutan;

**Penerimaan Pajak Daerah, PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Jumlah
Perusahaan di Kota Cilegon Tahun 2001 - 2016**

Tahun	Pajak Daerah (Rupiah)	PDRB (Triliun Rupiah)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Inflasi (%)	Jumlah Perusahaan (Industri)
2001	22.830.191.298,00	7,21	301.225	12,75	72
2002	39.838.876.465,00	7,72	309.097	9,68	67
2003	47.770.985.834,00	8,28	331.024	5,21	68
2004	59.967.239.200,00	8,88	334.185	6,40	64
2005	66.018.469.438,00	9,44	335.913	15,24	72
2006	77.001.182.988,00	9,97	339.316	7,67	51
2007	73.410.440.255,00	10,51	338.027	6,31	72
2008	79.545.273.663,00	11,05	343.599	12,96	69
2009	82.328.146.411,00	11,58	349.162	3,11	72
2010	84.928.180.856,00	12,19	374.559	6,12	76
2011	172.965.160.026,00	18,23	385.720	2,35	77
2012	147.686.642.561,00	19,47	392.341	3,91	77
2013	177.144.972.228,00	20,62	398.304	7,98	77
2014	340.323.435.803,00	21,61	405.303	9,93	81
2015	412.600.922.492,00	22,58	412.106	3,94	79
2016	392.549.543.855,00	23,83	418.705	4,22	79

Hasil Uji Log Linier

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 02/15/18 Time: 16:33
 Sample: 2001 2016
 Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.18E+11	2.95E+11	-1.078999	0.3059
X1	3.83E+09	1.24E+09	3.090230	0.0114
X2	1124359.	900200.7	1.249010	0.2401
X3	-3.30E+09	4.45E+09	-0.741372	0.4755
X4	-1.67E+08	2.40E+09	-0.069539	0.9459
Z1	-7.84E+10	7.91E+10	-0.991090	0.3450
R-squared	0.897383	Mean dependent var		1.42E+11
Adjusted R-squared	0.846074	S.D. dependent var		1.27E+11
S.E. of regression	5.00E+10	Akaike info criterion		52.38681
Sum squared resid	2.50E+22	Schwarz criterion		52.67653
Log likelihood	-413.0945	Hannan-Quinn criter.		52.40165
F-statistic	17.48988	Durbin-Watson stat		1.774459
Prob(F-statistic)	0.000117			

Hasil Uji MWD Log Linier

Dependent Variable: LOG(Y)
 Method: Least Squares
 Date: 02/15/18 Time: 16:36
 Sample: 2001 2016
 Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-36.84594	20.73723	-1.776802	0.1060
LOG(X1)	0.448557	0.197151	2.275191	0.0462
LOG(X2)	4.989086	1.662991	3.000068	0.0133
LOG(X3)	-0.055670	0.135454	-0.410989	0.6897
LOG(X4)	-0.645820	0.642678	-1.004889	0.3386
Z2	3.67E-12	4.30E-12	0.853709	0.4132
R-squared	0.954606	Mean dependent var		25.34714
Adjusted R-squared	0.931909	S.D. dependent var		0.834328
S.E. of regression	0.217712	Akaike info criterion		0.068710
Sum squared resid	0.473986	Schwarz criterion		0.358431
Log likelihood	5.450320	Hannan-Quinn criter.		0.083546
F-statistic	42.05852	Durbin-Watson stat		2.056483
Prob(F-statistic)	0.000002			

Hasil Uji Log Linier

Dependent Variable: LOG(Y)
 Method: Least Squares
 Date: 02/15/18 Time: 22:09
 Sample: 2001 2016
 Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-42.72195	19.81085	-2.156492	0.0540
LOG(X1)	0.377877	0.184972	2.042894	0.0658
LOG(X2)	5.477238	1.607732	3.406811	0.0059
X3	-0.001270	0.018562	-0.068429	0.9467
LOG(X4)	-0.710406	0.639508	-1.110863	0.2903
R-squared	0.950353	Mean dependent var		25.34714
Adjusted R-squared	0.932300	S.D. dependent var		0.834328
S.E. of regression	0.217086	Akaike info criterion		0.033261
Sum squared resid	0.518390	Schwarz criterion		0.274695
Log likelihood	4.733911	Hannan-Quinn criter.		0.045624
F-statistic	52.64124	Durbin-Watson stat		2.105559
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil Uji Heteroskedastisitas Breusch-Pagan-Godfrey

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.308866	Prob. F(4,11)	0.3259
Obs*R-squared	5.159534	Prob. Chi-Square(4)	0.2713
Scaled explained SS	2.350379	Prob. Chi-Square(4)	0.6716

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 02/15/18 Time: 17:12

Sample: 2001 2016

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.575649	4.167980	0.138112	0.8926
LOG(X1)	0.030709	0.038837	0.790720	0.4458
LOG(X2)	-0.079793	0.333839	-0.239017	0.8155
LOG(X3)	0.030361	0.027209	1.115867	0.2883
LOG(X4)	0.078215	0.128184	0.610176	0.5541
R-squared	0.322471	Mean dependent var		0.031783
Adjusted R-squared	0.076097	S.D. dependent var		0.045574
S.E. of regression	0.043806	Akaike info criterion		-3.167798
Sum squared resid	0.021108	Schwarz criterion		-2.926364
Log likelihood	30.34239	Hannan-Quinn criter.		-3.155435
F-statistic	1.308866	Durbin-Watson stat		2.292993
Prob(F-statistic)	0.325946			

Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	2.372316	Prob. F(4,11)	0.1159
Obs*R-squared	7.410136	Prob. Chi-Square(4)	0.1157
Scaled explained SS	4.602352	Prob. Chi-Square(4)	0.3306

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 02/15/18 Time: 17:13

Sample: 2001 2016

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.402252	8.588381	-0.279710	0.7849
LOG(X1)	0.023829	0.080026	0.297765	0.7714
LOG(X2)	0.032696	0.687895	0.047530	0.9629
LOG(X3)	0.100742	0.056066	1.796861	0.0998
LOG(X4)	0.439055	0.264132	1.662255	0.1247

R-squared	0.463134	Mean dependent var	0.146114
Adjusted R-squared	0.267909	S.D. dependent var	0.105496
S.E. of regression	0.090264	Akaike info criterion	-1.721841
Sum squared resid	0.089624	Schwarz criterion	-1.480407
Log likelihood	18.77473	Hannan-Quinn criter.	-1.709477
F-statistic	2.372316	Durbin-Watson stat	2.380174
Prob(F-statistic)	0.115919		

Hasil Uji Autokorelasi Breusch-Godfrey

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.343642	Prob. F(2,9)	0.7181
Obs*R-squared	1.135154	Prob. Chi-Square(2)	0.5669

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 02/15/18 Time: 17:14

Sample: 2001 2016

Included observations: 16

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.226733	21.90476	-0.010351	0.9920
LOG(X1)	-0.016861	0.205033	-0.082235	0.9363
LOG(X2)	0.052142	1.762526	0.029584	0.9770
LOG(X3)	-0.015218	0.144295	-0.105462	0.9183
LOG(X4)	-0.086415	0.701359	-0.123210	0.9046
RESID(-1)	-0.130115	0.353726	-0.367841	0.7215
RESID(-2)	-0.275083	0.347933	-0.790622	0.4495
R-squared	0.070947	Mean dependent var		1.46E-14
Adjusted R-squared	-0.548421	S.D. dependent var		0.184125
S.E. of regression	0.229117	Akaike info criterion		0.190469
Sum squared resid	0.472452	Schwarz criterion		0.528476
Log likelihood	5.476249	Hannan-Quinn criter.		0.207778
F-statistic	0.114547	Durbin-Watson stat		1.768790
Prob(F-statistic)	0.992085			